

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dilihat pada saat sekarang ini perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia terus mengalami perkembangan [1]. Perkembangan tersebut menyebabkan penggunaan TIK semakin bertambah di seluruh dunia dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan internet yang merupakan penunjang utama dalam penggunaan TIK dalam berbagai bidang. Sehingga proses terjadinya pertukaran informasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa ada kendala dengan jarak dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Informasi adalah aset yang tak ternilai bagi Departemen Komunikasi dan Informasi XYZ. Manajemen informasi yang baik memberi lembaga akses ke kemampuan manajemen ancaman keamanan informasi yang baik [2]. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu memiliki pengelolaan risiko keamanan informasi yang jelas untuk menghindari atau mencegah pencurian data, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2018 tentang sistem elektronik pemerintah, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (IKT) memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan inovasi dalam pengembangan aparat pemerintah melalui implementasi sistem elektronik pemerintah (SPBE). atau pemerintah elektronik, yaitu pemerintah yang menggunakan ICT (*Information and Communication Technologies*) untuk menyediakan layanan kepada badan-badan pemerintah, karyawan awam, orang-orang bisnis, masyarakat, dan pihak lain [3]. Ini dapat ditafsirkan dengan cara yang diharapkan bahwa implementasi pemerintah akan memanfaatkan pencapaian teknologi informasi dan komunikasi untuk menjadikannya lebih efektif dan efektif. Sebagai pedoman pelaksanaan maka dikeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 [4]

tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mentransformasi sistem pemerintahan tentu saja akan memunculkan masalah baru yang lebih kompleks. Salah satu permasalahannya adalah keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ untuk melakukan pembaharuan keamanan informasi pemerintah provinsi dan kota sesuai dengan peraturan Direktur Badan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pedoman pengkodean [4]. Sejak tahun 2018, Pemerintah Provinsi XYZ sendiri memiliki *framework* terkait keamanan informasi untuk melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan aset informasi di lingkungan Pemprov XYZ [5]. *Framework* tersebut nantinya akan menjadi pedoman untuk mengintegrasikan manajemen SMKI.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ merupakan instansi pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnisnya termasuk sub-proses dan aktifitas lainnya untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat [6]. Oleh karena itu, Diskominfo Provinsi XYZ harus menerapkan keamanan informasi untuk menjalankan proses bisnisnya dikarenakan banyak terkaitnya dengan banyak pihak, baik di dalam maupun luar instansi.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ tahun 2020 [7], Nilai hasil evaluasi akhir termasuk dalam kategori “cukup baik” dengan hasil Indeks KAMI di level 2,9 atau dengan nilai 482 yang terdiri dari 8 aspek penilaian. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, penerapan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ dapat terbilang belum maksimal dikarenakan masih terdapat aspek yang mendapat nilai rendah meskipun hasil dari keseluruhan penilaiannya sudah dalam kategori “cukup baik”.

Aspek yang mendapatkan nilai terendah adalah aspek pengelolaan risiko pada Indeks KAMI mendapat nilai terendah dengan nilai 26 dan tingkat kematangan I+. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dapat menggambarkan jika belum maksimalnya penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi pada Diskominfo Provinsi XYZ untuk melindungi aset utama dalam instansi. Sehingga perlu dilakukannya evaluasi terhadap aspek pengelolaan risiko agar dilakukan perbaikan dan meningkatkan nilai tingkat kematangan pada aspek pengelolaan risiko.

Untuk menilai manajemen risiko keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi perlu disiapkan dengan memasukkan peran dan tanggung jawab pihak yang berwenang dalam kebijakan dan prosedur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ. Hal ini untuk menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ sebagai organisasi yang reaktif karena terdapat pengelolaan risiko keamanan informasi yang jelas. Salah satu kriteria untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan risiko keamanan informasi adalah dengan menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Index KAMI versi 4.1) yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan SNI-ISO/IEC 27001:2013 [8].

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah yang didapatkan adalah:

1. Mengetahui penilaian aspek risiko dengan metode Index KAMI versi 4.1 pada tahun 2021 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ
2. Memberikan rekomendasi perbaikan pada aspek pengelolaan risiko kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ

### **1.3. Tujuan**

Tujuan dilakukannya penelitian kerangka kerja keamanan informasi ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko pada tahun 2021 dengan metode Indeks KAMI versi 4.1
2. Memberikan rekomendasi perbaikan manajemen risiko menggunakan metode Indeks KAMI versi 4.1 untuk meningkatkan penerapan pengelolaan risiko pada Diskominfo Provinsi XYZ

### **1.4. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Indeks KAMI versi 4.1
2. Penelitian hanya dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ tahun 2021
3. Penilaian hanya dilakukan pada aspek pengelolaan risiko dengan metode Indeks KAMI versi 4.1
4. Rekomendasi perbaikan hanya diberikan pada aspek pengelolaan risiko berdasarkan metode Indeks KAMI versi 4.1

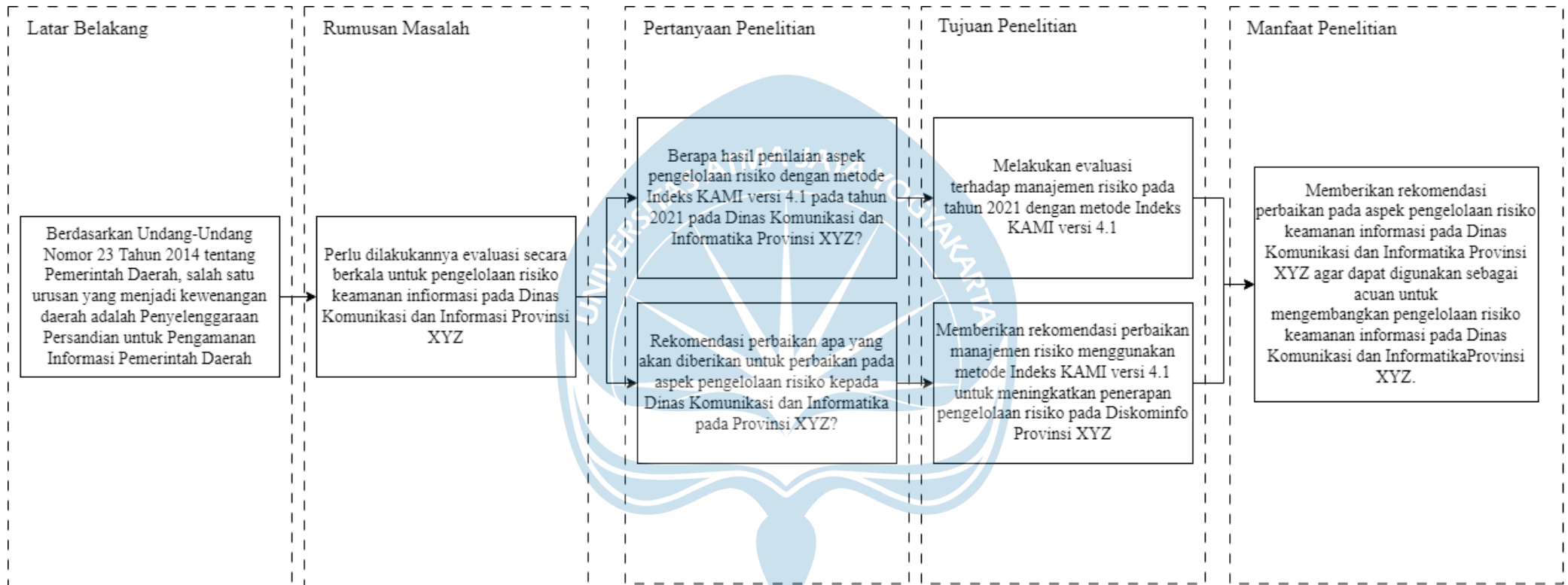
### **1.5. Manfaat Penelitian**

Memberikan rekomendasi perbaikan pada aspek pengelolaan risiko keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pengelolaan risiko keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi XYZ.

## 1.6. Bagan Keterkaitan

Pada Gambar 1.1 berikut akan menunjukkan hubungan antara latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bagan keterkaitan dibawah diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami keterkaitan antara bagian dalam penelitian ini.





Gambar 1. 1 Bagan Keterkaitan